DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* Refika Aditama, Bandung, 2008.

Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Darman Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002.

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi,* Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2004.

Evie Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

H. R. Otje S. Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

_____, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

_____, *Penyusunan Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum UNIKOM*, Makalah pada acara Up Grading Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, 2010

Leden Marpaung**,** *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*¸Cetakan ke-2, Djambatan ,Jakarta 2004.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002

Piotr Stzompka, *Sosiologi Perubahan Sosial (The Sociology Of Social Change) diterjemahkan oleh Alinandan,* Prenada Media, Jakarta, 2004.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Simons dalam Purwaning M. Yanur, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi,* PT. Alumni, Bandung, 2007.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986.

Taufiqurrahman Ruki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia,* Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005.

Tim Redaksi KBBI Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010.

W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,* BPHN, Bali, 2006.

PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Situs-Situs

http://ti.or.id;

http://gagasanhukum.wordpress.com;

http://www.tindakpidanakorupsi.org;

http://wahy.multiply.com;

http://ariperdana.blogspot.com;

http://penulispadangpanjang.blogspot.com;

http://www.wikipedia.com;

www.kpk.go.id;

http://pemberantasankorupsi.wordpress.com;

http://www.interpol.go.id;

http://id.shvoong.com;

www. Komisi Hukum.go id

Sumber lain

Roscoe Pound, Dikutip dari Skripsi Evie Arisandy Tahun 2011 tentang *"Tinjauan Hukum Mengenai Alih Fungsi Bangunan Bersejarah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang"*, hlm 15.

Dikutip dari Handout Hukum Penologi tentang *Teori Pemidanaan*, Tanggal 27 April 2012, hlm 13-15.